

HUMAS

Ananta Wahana: PNM Bisa Berperan Mengentaskan Kemiskinan

Updates. - HUMAS.CO.ID

Mar 25, 2023 - 21:24



Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana

DENPASAR - Anggota Komisi VI [DPR RI](#) Ananta Wahana mengatakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ini bisa mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang sudah dijalankan. Hal ini mengingat PT PNM mengalami perkembangan yang pesat di [Bali](#) pada masa Pandemi Covid-19.

“Kalau hal ini, ini bisa digarap terus secara masif, di semua daerah wilayah Republik [Indonesia](#) ini, saya yakin ini juga akan membantu mengentaskan kemiskinan,” kata Ananta Wahana kepada Parleментарia usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI [DPR RI](#) ke Denpasar, Provinsi [Bali](#), Sabtu (25/3/2023).

“Hari ini, terbukti bahwa PMN hadir itu di dalam ikut menyelesaikan krisis kaitannya dengan Pandemi Covid-19,” sambungnya.

Lebih lanjut, kata Ananta, juga membeberkan fakta perkembangan PNM dalam membantu masyarakat setempat.

“Rakyat yang sampai ratusan ribu tidak bekerja, kemudian bisa diberi pinjaman, kemudian akhirnya bisa berpenghasilan, bisa menjadi tulang punggung keluarga karena banyak laki-lakinya pada saat pandemi ini di PHK, tidak berpenghasilan. Melalui PMN ini, saya yakin bahwa dia juga mengajarkan bagaimana membuat suasana gotong royong di antara masyarakat,” ujar Ananta.

Kendati demikian, Legislator Dapil [Banten](#) mendorong agar PNM juga harus mendapatkan sosialisasi Kebijakan Masif sampai ke tingkat Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan agar PNM tidak mendapatkan gangguan dari pesaing-pesaingnya di daerah.

“Agar gerakannya PT PNM ini tidak diganggu oleh pengganggu-pengganggu yang merasa terganggu di daerah. Atau lebih tepatnya para rentenir,” beber Ananta.

[Politisi](#) Fraksi Partai [PDI-Perjuangan](#) menyebut PT Permodalan Nasional Madani tak perlu diberikan bantuan oleh negara. Sebab, kata Ananta perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang signifikan.

“Rasanya PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah tidak perlu lagi dibantu keuangan oleh negara. Misalnya PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak perlu lagi. Karena sekarang ini yang awalnya Rp7 triliun sampai sudah Rp50 triliun. Kalau itu tadi luar biasa,” ucapnya.

“Ya, saya berharap kalau di Bali tadi sudah Rp500.000 antara [Bali](#) dan [NTT](#), ini harus masif sampai ke tingkat desa. Sehingga masyarakat-masyarakat itu bisa terbantu dengan permodalan dan bisa bekerja lebih baik lagi,” tutup Ananta.
(aas/aha)